

▶ BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Susahnya Melantai di Bursa

Masalah permodalan bagi bank pembangunan daerah atau BPD masih menjadi isu yang menarik perhatian publik. Apalagi BPD sebagai motor lembaga keuangan daerah, mengemban harapan besar untuk menjalankan peran menjaga pembangunan wilayahnya yang berkualitas.

Ipak Ayu H.N
ipak.ayu@bisnis.com

Upaya untuk mendorong bank daerah untuk melantai di bursa pun didevakan untuk mengatasi masalah permodalan. Pasalnya, dari 27 BPD di Indonesia, saat ini hanya 11 BPD yang tercatat menarik pendanaan dari pasar modal.

Dari 11 BPD itu, tiga di

▶ **Permodalan BPD saat ini terbatas, sedangkan kebutuhan modal untuk meningkatkan pembiayaan terus meningkat.**

antaranya memutuskan menjadi perusahaan terbuka, sedangkan delapan lainnya baru sebatas melakukan penerbitan obligasi.

Tiga BPD yang telah melakukan penawaran umum saham perdana (*initial public offering*/IPO) yakni PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk. (BJTM), dan PT BPD Banten Tbk. (BEKS).

Untuk itu, pekan lalu tepatnya Jumat (26/10) Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Asosiasi Bank Daerah atau Asbada menggelar diskusi bertajuk Akselerasi Pertumbuhan BPD Melalui Penawaran Umum.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman menilai pentingnya BPD untuk mencatatkan diri

sebagai perusahaan terbuka dalam kondisi kebutuhan pembiayaan yang terus bertumbuh.

Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam perkembangan dunia usaha di daerah. "Permodalan BPD saat ini terbatas, sedangkan kebutuhan modal untuk meningkatkan pembiayaan terus meningkat. Pasar modal menjadi alternatif pendanaan dan permodalan," katanya, akhir pekan lalu.

Ketua Umum Asbada Kresno Sediasi mengatakan, sebenarnya banyak bank daerah yang ingin melakukan IPO. Namun, dengan model bisnis serta berbagai ketentuan di dalamnya, membuat BPD harus melakukan pertimbangan secara matang untuk merealisasikan rencana *go public*.

Menurut Kresno, pemegang saham BPD terdiri dari pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk itu, satu BPD yang akan IPO harus mengantongi restu dari keseluruhan lembaga eksekutif dan legislatif di masing-masing daerahnya.

"Jangan salah, sekarang satu daerah ada yang memiliki lebih dari 20 sampai 33 pemilik saham. Ini tentu menjadi hal yang terus dipertimbangkan BPD," ujarnya. Akan tetapi, peluang BPD

untuk melantai di bursa masih sangat besar. Pasalnya, aset yang dimiliki 27 BPD saat ini masih kecil, yaitu Rp670 triliun.

Dengan begitu, ekspansi bank daerah ke pasar modal ini seiring dengan program transformasi penguatan kelembagaan dan struktural. Selain itu, BPD bisa mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih baik.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank DKI ini mengakui, perseroan juga masih dalam tahap persiapan untuk bisa IPO. Persiapan itu pun sudah dimulai dengan memasukkan dalam rencana bisnis bank pada tahun lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Muhammad Asadi Budiman mengatakan, persoalan utama untuk menjadi perusahaan terbuka antara lain nilai saham pemerintah daerah yang terdilusi. Hal ini akan menggerus dividen perseroan.

Menurutnya, logika tersebut bukan teori belaka. Berdasarkan pengalaman melakukan IPO pada 2009, perseroan mau tidak mau mengalami hal tersebut. BJBR bahkan mengaku membutuhkan waktu hingga 3 tahun sampai benar-benar memiliki posisi yang kuat dari sisi kepemilikan pemerintah

provinsi atau pemprov.

"Tentu kami juga mengalami resistensi, terdilusi dari sisi saham yang berakibat dividen turun. Kami butuh 3 tahun sampai benar-benar *firm* dari sisi Pemprov. Namun, kami mengakui dalam APBD itu program harus riil. Maka dibutuhkan modal supaya skala usaha meningkat," katanya.

Asadi mengakui IPO menjadi alternatif untuk mendukung pendanaan daerah. Setiap BPD akan terbantu dengan penambahan modal yang signifikan, walaupun persentasenya berkurang.

PERATURAN PEMERINTAH

Sementara itu, belum selesai persoalan proporsi kepemilikan BPD ketika menjadi perusahaan terbuka, muncul PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Regulasi itu mengamanatkan bahwa setiap Pemda harus memiliki 51%.

Meski regulasi itu muncul setelah BJBR menyelesaikan proses IPO, PP 54/2017 tetap menjadi persoalan lain. Pasalnya, tidak ada pengendali pemrov yang memiliki saham hingga 51%.

"Kala itu sempat jadi wacana dan permasalahan kalau pemrov mau jadi 51% harus *buy back* Rp2,5 triliun. Ini angka yang

besar. Jadi PP itu adalah masalah lain sampai sekarang," katanya.

Sementara itu, Koordinator Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Timur pada Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV OJK Toto Zurianto memastikan pihaknya akan terus menyempatkan berbagai persoalan yang dinilai menjadi hambatan bagi BPD yang ingin melakukan IPO.

Adanya PP 54/2017 saat ini juga masih menunggu aturan turunan yang lebih rinci dari Menteri Dalam Negeri. Dengan diskusi yang berjalan diharap menjadi masukan pemerintah dalam meramu aturan teknis turunannya.

Analisis Perbankan MNC Sekuritas Nurulita Hawaningrum mengatakan, sebelum IPO tentu BPD perlu melihat kondisi pasar yang lebih fluktuatif seperti saat ini. Dengan adanya *net sell asing* tentu mempengaruhi kepercayaan investor.

Sementara itu, PP 54/2017 hanya untuk kepemilikan mayoritas Pemda. Jika tujuan BUMD untuk kesejahteraan daerah, seharusnya sangat berkaitan dengan tujuan atau misi satu pemerintahan daerah itu sendiri.

Pada akhirnya, keinginan BPD untuk melakukan IPO sangat bergantung pada komitmen masing-masing kepala daerah. ■

▶ BANK BUMN

BRI Salurkan KUR untuk Nelayan

BALI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. membantu nelayan dengan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor perikanan dan memberikan donasi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

Bank pelat merah itu tercatat mengucurkan KUR sebesar Rp1,5 triliun kepada lebih dari 58.000 debitur hingga September 2018.

Direktur Kredit Mikro dan Ritel BRI Priyastomo mengatakan, potensi sektor perikanan di Indonesia terbilang besar. Pasalnya para nelayan memiliki dukungan sumber daya alam yang melimpah.

"Secara total KUR mikro BRI sudah habis kuotanya tahun ini, termasuk untuk disalurkan ke perikanan," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (30/10).

Sekretaris Perusahaan BRI Bambang Triharoto menyampaikan, pemerintah menargetkan 50% porsi penyaluran KUR sepanjang 2018 diberikan kepada sektor produktif. Hal itu meliputi bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Sektor perikanan termasuk sektor produktif yang terus kami dorong pertumbuhannya melalui penyaluran KUR," kata Bambang.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang disalurkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melasat tinggi tahun ini dibandingkan dengan yang lain. Hingga Agustus 2018, kredit UMKM perikanan naik 21,9% secara tahunan (yoy) menjadi Rp6,6 triliun.

Sementara itu, guna menjaga keberlangsungan ekosistem laut, BRI menyalurkan donasi kepada Pandu Laut Nusantara sebesar Rp150 juta. Penyerahan secara simbolis dilakukan di stan BRIKopi yang berada di area Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Anggota Pandu Laut Nusantara Mohammad Ridwan Hafiedz mengatakan bahwa donasi tersebut akan digunakan untuk mengedukasi penduduk Indonesia yang tinggal di pinggir pantai.

BANGUN HUNTARA

Sementara itu, di Sulawesi Tengah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. membangun 550 hunian sementara (huntara) di Desa Lolu, Kecamatan Biromaru, dan Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. BNI tercatat membangun 450 huntara dan Bank Mandiri 100 huntara.

Hingga saat ini, BNI tercatat sudah membangun 227 huntara dari target 450 huntara di Sigi. Ditargetkan seluruhnya selesai dibangun awal November 2018.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kemajuan proyek huntara yang dibangun dua bank BUMN tersebut.

"Terima kasih BNI dan Bank Mandiri yang telah membangun hunian sementara ini. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa mendapat hunian sementara yang lebih baik terutama di saat musim hujan. Terima kasih juga PLN yang bersinergi mempercepat kelistrikan untuk memenuhi penerangan di rumah," ungkap Menteri Rini dalam siaran pers, Selasa (30/10).

Selain membangun hunian sementara, BNI dan Bank Mandiri juga membangun ruang kelas sementara untuk membantu para siswa tetap belajar mengingat bangunan kelas di sekolah lamanya tak dapat digunakan.

BNI tercatat membangun ruang kelas sementara sebanyak 14 kelas di Sulteng. Bank Mandiri membangun sekolah sementara untuk di dekat hunian sementara Sibalaya. (*Muhammad Khadafi*)



SURYA PERTIWI
EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF TOTO

PT. SURYA PERTIWI Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kantor Pusat
Gedung Toto
Jl. Tomang Raya No. 16-18
Jakarta 11430 - Indonesia
Telp. (62-21) 2929-8585
Fax (62-21) 568-0068
website: www.suryapertiwi.co.id
email: corpsec@suryapertiwi.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos-pos	30 September 2018	31 Desember 2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	290.506.418.327	160.434.757.057
Piutang usaha - pihak ketiga	480.877.793.088	429.256.442.690
Piutang lain-lain - pihak ketiga	15.117.190.930	10.044.451.008
Persediaan, neto	504.623.622.165	327.993.231.917
Uang muka	4.237.259.652	4.135.577.958
Biaya dibayar di muka - jangka pendek	15.138.982.865	3.888.740.898
Pajak dibayar di muka	148.080.092.233	75.250.249.320
TOTAL ASET LANCAR	1.458.581.359.260	1.011.003.450.848
ASET TIDAK LANCAR		
Biaya dibayar di muka - jangka panjang	9.035.000.000	10.498.000.000
Uang muka pembelian aset tetap dan properti investasi	47.267.116.029	25.311.869.401
Aset pajak tangguhan	15.259.582.212	14.256.031.893
Aset tetap - neto	887.688.495.029	768.595.173.650
Properti investasi	268.796.806.614	185.844.702.518
Aset tidak berwujud - neto	48.880.187	54.585.938
Aset tidak lancar lainnya	104.548.336	4.316.538.191
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.228.200.428.407	1.008.876.901.591
TOTAL ASET	2.686.781.787.667	2.019.880.352.439
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	180.716.000.000	329.020.397.322
Utang usaha		
Pihak-pihak berelasi	443.417.668.296	434.099.464.363
Pihak ketiga	12.522.690.707	1.537.940.531
Utang lain-lain		
Pihak-pihak berelasi	5.561.357.748	3.215.376.911
Pihak ketiga	33.009.807.867	31.279.752.790
Biaya yang masih harus dibayar	21.639.687.768	11.376.918.664
Utang pajak	43.875.881.251	15.206.065.055
Uang muka dan jaminan pelanggan	147.542.314.871	186.344.929.608
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	576.725.000	4.174.643.000
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen	370.071.885	1.261.784.170
Utang bank	3.997.241.966	20.849.140.346
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	893.229.447.359	1.038.366.412.760
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Utang pembiayaan konsumen	173.502.257	291.228.201
Utang bank	10.335.406.416	95.965.000.000
Pendapatan diterima dimuka	8.463.555.000	-
Utang kepada pihak berelasi	168.787.700.000	73.857.700.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	45.338.822.288	38.338.407.412
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	233.098.985.961	208.452.335.613
TOTAL LIABILITAS	1.126.328.433.320	1.246.818.748.373
EKUITAS		
Modal saham: nilai nominal Rp100 per saham; modal dasar: 8.000.000.000 saham (500.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017); modal ditempatkan dan disetor penuh: 2.700.000.000 saham (200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017); Cadangan umum	270.000.000.000	200.000.000.000
5.000.000.000	5.000.000.000	
Tambahan modal disetor	705.357.979.812	-
Saldo laba	110.522.792.219	86.351.581.035
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.090.880.772.031	291.351.581.035
Keperluan non-pengendali	469.572.582.316	481.710.023.031
TOTAL EKUITAS	1.560.453.354.347	773.061.604.066
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.686.781.787.667	2.019.880.352.439

Catatan :

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT. Surya Pertiwi Tbk ("Perusahaan") untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2018 dan 2017, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tersebut diatas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan.

Jakarta, 31 Oktober 2018

DIREKSI
PT. SURYA PERTIWI Tbk



PT ASURANSI JASA TANIA TBK
("PERSEROAN")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 November 2018
Tempat : Gedung Agro Plaza, Lantai 9
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950
Waktu : 10.00 WIB - selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar

Penjelasan:
• Mengusulkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan Perseroan telah mengubah alamat dan tempat kedudukan Kantor Pusat;
• Mengusulkan perubahan pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan terjadi kesalahan dalam rujukan ayat pada Pasal tersebut.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan: Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Direktur Teknik Perseroan yang pada saat ini dirangkap oleh Direktur Utama Perseroan.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi.
- Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Untuk saham-saham yang ditiptkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada 30 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
- Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir.
- Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Para pemegang saham atau kuasa diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat paling lambat 15 menit sebelum Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 31 Oktober 2018
PT Asuransi Jasa Tania Tbk
Direksi